

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007
Data : Oktober 2006 – Oktober 2007



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Ketapang tahun 2007, merupakan sebuah laporan tahunan yang menggambarkan status keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang selama kurun waktu satu tahun. Dalam penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini menggunakan pendekatan model S-P-R (State, Pressure, Response). Pendekatan ini menekankan pada hubungan sebab akibat yang diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan dan pengambil keputusan serta masyarakat untuk dapat melihat hubungan antara permasalahan lingkungan hidup, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya.

Laporan SLHD 2007 ini disusun berdasarkan hasil penelitian Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (ESDM&LH) dan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait (*stake holder*) di Kabupaten Ketapang. Diharapkan dengan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ataupun acuan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya sehingga dapat menunjang dalam pembanguna yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah Kabupaten Ketapang ini, dalam penyusunan laporan ini kami menyadari jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih akurat guna penyusunan SLHD di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memenuhi kegunaanya.

Ketapang, Desember 2007

Bupati Ketapang

H. MORKES EFFENDI, Spd

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Penulisan Laporan	1
B. Visi dan Misi Kabupaten Ketapang	2
C. Gambaran Umum	5
BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	10
BAB III AIR	14
A. Kuantitas dan kualitas Air	15
B. Permasalahan Terhadap Kualitas dan Kuantitas Air	17
C. Respon dan Kebijakan yang diambil	19
BAB IV UDARA	20
BAB V LAHAN DAN HUTAN	23
BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI	26
BAB VII PESISIR DAN LAUT	27
BAB VIII REKOMENDASI	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Pendekatan SPR dalam Pengkajian SLHD Kab. Ketapang .	11
Gambar 2.2. Analisa Penyusunan berdasarkan S-P-R	13
Gambar 3.1. Kondisi DAS Kendawangan	16
Gambar 3.2. Kondisi DAS Pesabuhan	16
Gambar 3.3. Kondisi DAS Pawan	17
Gambar 3.4. Penambangan Pasir Zircon (puya) dan Emas.....	18
Gambar 4.1. Kondisi Pemantauan Kualitas Udara.....	20
Gambar 5.1. Aktivitas Illegal Logging.....	23

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1. Hasil Analisis Parameter Uji Kualitas Udara dan Kebisingan...	21

ABSTRAK

ABSTRAK

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) atau State of the Environmental Report (SoER) merupakan suatu laporan mengenai kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Laporan ini bertumpu pada basis data lingkungan yang berisi keadaan lingkungan pada kurun waktu tertentu, aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kondisi, dan tanggapan atas perubahan kondisi melalui kebijakan pemerintah maupun peran serta masyarakat. Metode analisis dengan memperhatikan tiga komponen utama diatas adalah metode S-P-R (State to Pressure Response).

Metode ini mengintegrasikan informasi yang utuh tentang berbagai hal yang terkait dengan perubahan kualitas lingkungan. Basis data yang digunakan adalah yang erat kaitannya dengan berbagai masalah lingkungan hidup. Aktivitas manusia yang dianalisa adalah yang memberikan tekanan terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tanggapan lebih banyak kepada usaha pengendalian tekanan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kabupaten Ketapang merupakan wilayah yang cukup banyak memiliki kekayaan sumber daya alam, yang juga merupakan penyangga ekosistem utama bagi wilayah sekitarnya. Hutan, baik alami maupun buatan, yang memiliki fungsi utama bagi kelangsungan ekosistem alami maupun fungsi buatan seperti penggerak pembangkit listrik, sumber air minum, irigasi lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan alasan kuat untuk melakukan pemantauan yang ketat terhadap kondisi lingkungannya.

Lahan kritis akibat kegiatan lain semakin tahun semakin bertambah luas. Semua lahan kritis tersebut berpotensi menimbulkan bencana alam, terutama pada musim hujan yang curah hujannya tinggi dan kekeringan di musim kemarau. Sementara itu sedimen yang terbawa aliran sungai, menyebabkan pencemaran yang cukup tinggi. Turunnya kualitas air ini diperparah oleh pencemaran akibat limbah cair industri, penambangan liar, illegal logging dan aktivitas lainnya. Kondisi ini amat menurunkan kualitas air.

Pemantauan kondisi lingkungan tersebut harus dilakukan secara kontinyu dan tepat, sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Kecepatan dan akurasi informasi kondisi lingkungan ini menyebabkan respon dari pemerintah maupun masyarakat akan cepat dan tepat pula.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penulisan Laporan

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan diperlukan suatu laporan akan potensi komponen sumber daya alam dan kondisinya sebagai acuan pembangunan. Dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dicapai melalui tidak dengan kerusakan lingkungan hidup. Penurunan sumber daya alam memiliki konsekuensi yang sangat luas seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup, bahkan sampai dengan terjadinya kelangkaan energi dan terjadinya bencana alam.

Selain itu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah (Provinsi/ Kota/ Kabupaten). Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good enviromental governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini adalah :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
2. meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (Investor).
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Enviromental Governance*) di daerah serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

B. Visi dan Misi Kabupaten Ketapang

Visi Kabupaten ketapang adalah *“Terwujudnya Kabupaten Ketapang sebagai daerah otonom yang aman, damai, demokratis, adil dan sejahtera, didukung masyarakat yang cendekiawan, mandiri, beriman dan taqwa serta pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa”*.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) butir, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan daerah otonom yang berbasis bahari, agribisnis dan pertambangan

Kabupaten Ketapang memiliki luas wilayah 35.809 Km² yang terdiri 33.809 Km² wilayah daratan dan 2.600 Km² wilayah perairan, diantaranya adalah pulau-pulau kecil sebanyak 108 buah pulau yang terdiri dari 56 pulau berpenghuni dan 52 pulau tidak berpenghuni yang tersebar mulai dari gugusan Pulau Karimata di barat pantai Kabupaten Ketapang dan pulau-pulau lain di selatan pantai Kabupaten Ketapang. Wilayah perairan laut tersebut adalah merupakan sumberdaya alam potensial yang cukup besar dan menjadi modal andalan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang. Pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Ketapang kedepan dititik beratkan pada pengelolaan potensi perairan laut dan kepulauan secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Ketapang sebagai Kabupaten bahari. Wilayah daratan Kabupaten Ketapang yang sangat luas, dengan beragam jenis tanah merupakan modal utama dalam pembangunan. Berdasarkan potensi yang ada, pada wilayah daratan pembangunan dititik beratkan pada sektor pertanian, yang pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Ketapang sebagai Kabupaten agraris. Dibidang pertambangan Kabupaten Ketapang memiliki bahan tambang mineral seperti bauksit, besi, kuarsa, kaolin, zircon, emas dan lainnya. Meskipun potensi bahan tambang masih dalam tahap eksplorasi, perencanaan pertambangan dan bahan mineral tersebut diarahkan untuk pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan tersebut secara nyata.

2. Mewujudkan daerah otonom yang aman dan damai

Sebagai salah satu daerah otonomi, Kabupaten Ketapang diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur potensi daerahnya

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi tersebut secara baik dan nyata, Kabupaten Ketapang kedepan harus tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian secara terus menerus. Secara umum Kabupaten Ketapang hingga saat ini merupakan kabupaten yang relatif aman dan damai diantara kabupaten dan kota di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini didasarkan pada tidak adanya konflik horizontal sosial terbuka baik antara suku (ethnis), agama dan lainnya termasuk rendahnya tingkat kriminalitas. Rasa aman dan damai adalah hak setiap orang untuk menikmatinya. Terminologi "aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan dari dalam negeri. Aman mencerminkan juga keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Sedangkan damai itu sendiri mengandung arti tidak terjadi konflik; tidak ada kerusuhan; keadaan tidak bermusuhan; dan rukun dalam sistem Negara hukum. Kabupaten Ketapang yang aman dan damai secara terus menerus merupakan cita-cita bersama yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini situasi dan kondisi Kabupaten Ketapang yang sudah aman dan damai saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi melalui penanaman nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang universal dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kondisi aman dan damai adalah merupakan sebuah prasyarat utama bagi penciptaan iklim investasi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mengembangkan potensi-potensi daerah. Berkembangnya potensi-potensi yang dimiliki daerah dengan sendirinya akan memacu pertumbuhan dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi yang aman dan damai-lah kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.

3. Mewujudkan Kabupaten yang demokratis, adil dan sejahtera

Secara demografi Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang heterogen untuk itu inisiasi dan atau pengembangan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi pada setiap tingkatan kehidupan bermasyarakat dalam penataan kehidupan sosial politik lokal di Kabupaten Ketapang yang mengacu pada kerangka politik nasional (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah sangat penting demi terwujudnya masyarakat yang pluralis dan demokratis. Tentunya pembangunan masyarakat yang pluralis dan demokratis tersebut tidak dapat berdiri sendiri (parsial), tetapi dilakukan secara simultan dan utuh dengan keadilan. Keadilan memiliki makna yang dalam bagi bangsa dan Negara Indonesia. Ini terlihat jelas

dalam pembukaan UUD 1945. Adil juga menempati posisi penting dalam falsafah dan dasar Negara Indonesia-Pancasila. Dalam Pancasila adil disebutkan dalam dua pasal, yaitu pada pasal 4 (empat) kemanusiaan yang adil dan beradab dan pasal 5 (lima) Keadilan sosial. Tanpa adanya keadilan pada dasarnya bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Terminologi “adil” mengandung makna imbang, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Dengan demikian adil mempunyai korelasi yang sinergis dengan demokrasi sementara demokrasi sendiri memiliki arti sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara di depan hukum. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar, berpegang pada konstitusi dan hukum; ataupun tidak sewenang-wenang. Adil menuntut tidak berat sebelah atau tidak memihak, dengan demikian pada tingkatan tertentu dimana nilai atau norma sosial yang diakui dan keagamaan menjadi pertarungan maka adil akan berpihak (disedemokrasi) demi kebaikan semua elemen yang diukur dari nilai atau norma yang diakui tersebut. Adil menghendaki kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan. Pada tingkat akhir proses-proses diatas bermuara pada perwujudan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengupayakan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan rakyat dan Negara Indonesia. Berdasarkan terminologinya “sejahtera” berarti keadaan aman sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera memiliki dimensi fisik atau materi dan dimensi rohani. Kecukupan materi tidak akan ada artinya jika jiwa merasa terancam ataupun batin tertekan, kering dan menderita. Dimensi rohani dan batiniah dari sejahtera akan diperkuat apabila dapat dicapai keadaan damai dan adil. Sub-makna sejahtera yaitu sentosa yang bermakna berada dalam keadaan aman dan tenteram; makmur yang berarti dalam keadaan serba kecukupan atau tidak berkekurangan. Konklusi umum dari penataan proses yang dilakukan adalah pencapaian pembangunan yang mensejahterakan yaitu pembangunan yang menciptakan kedamaian dan pembangunan yang membawa keadilan. Aman dan damai, demokratis, adil dan sejahtera sebagaimana telah disebut diatas adalah terintegral dimana satu dengan lainnya saling terkait dan harus dicapai secara bersama dalam proses yang simultan. Berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 bahwa kesejahteraan dicapai adalah kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, demi tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

4. Mewujudkan masyarakat yang cendekiawan, mandiri, beriman dan taqwa

Dalam proses pembangunan daerah dan nasional, pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan bagian yang sangat penting. Untuk itu percepatan proses pembangunan bidang sumberdaya manusia meski menjadi prioritas dalam kerangka pembentukan masyarakat cendekiawan. Masyarakat yang cendekiawan (intelektual) merupakan salah satu dasar terbentuknya masyarakat yang mandiri. Suatu proses panjang dan terus menerus meski dilakukan melalui kebijakan atau program yang mendukung dan atau menstimulasi/inisiasi proses-proses menuju kemandirian masyarakat tersebut. Proses pembangunan daerah juga tidak melepaskan pembangunan bidang keagamaan (religion) demi terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terbentuknya masyarakat yang beriman dan taqwa dengan sendirinya akan menumbuhkan masyarakat yang berahklak mulia. Sinergis dengan misi pembangunan daerah lainnya maka pembangunan bidang kerohanian meski dibangun juga kerukunan antar umat beragama secara simultan dalam pembangunan bidang keagamaan.

5. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa diupayakan melalui penegakkan kembali supremasi hukum dengan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut prinsip demokrasi dan pemberdayaan; pelayanan; transparan dan akuntabilitas; partisipasi; kemitraan; desentralisasi; konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Kemudian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditempuh prioritas kebijakan yang meliputi pemberantasan praktek KKN, pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggara Negara.

C. Gambaran Umum

Kabupaten ketapang sebagian besar adalah daratan yang berdataran rendah dan merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 35.809 Km² atau sekitar 24,4 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dimana dari luas total Kabupaten Ketapang tersebut luas daratan mencapai 33.209 Km² atau sekitar 92,74 persennya dan 2.600 Km² atau sekitar

7,26 persennya berupa perairan. Secara administratif Kabupaten Ketapang terdiri dari 25 kecamatan dengan ibu kotanya Delta Pawan, akan tetapi terhitung mulai tanggal 22 Juni 2007 lima kecamatan yaitu kecamatan Pulau Maya Karimata, Seponti Jaya, Sukadana, Simpang Hilir dan Teluk batang telah menjadi Kabupaten Kayung Utara. Kabupaten Ketapang secara geografis terletak di antara 0°19'00" - 3°05'00" Lintang Selatan dan 108°42'00" - 111°16'00" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif batas wilayah Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan Kab. Pontianak, Kab. Sintang dan Kab. Sanggau
Selatan	: Berbatasan dengan Laut Jawa
Barat	: Berbatasan dengan Laut Natuna dan Kab. Kayung Utara
Timur	: Berbatasan dengan Prop. Kalimantan Tengah dan Kab. Sintang

Demografi penyebaran penduduk di Kabupaten Ketapang berjumlah secara umum belum merata, jumlah penduduk sebanyak 486.792 jiwa dengan kepadatan penduduk hanya berkisar antara 13-14 jiwa per km². Sebagian besar kecamatan penduduknya masih relatif jarang.

Dalam pengembangan kabupaten Ketapang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pola struktur tata ruang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yaitu :

- 1. Wilayah Pembangunan I**, meliputi : a. Kecamatan Delta Pawan; b. Kecamatan Muara Pawan; c. Kecamatan Matan Hilir Utara; d. Kecamatan Benua Kayong; e. Kecamatan Matan Hilir Selatan; dan f. Kecamatan Kendawangan. Dengan pusat pengembangan Kecamatan Delta Pawan.
- 2. Wilayah Pembangunan II**, meliputi : a. Kecamatan Sukadana; b. Kecamatan Simpang Hilir; c. Kecamatan Teluk Batang; d. Kecamatan Pulau Maya Karimata; dan e. Kecamatan Seponti Jaya. Dengan pusat pengembangan Kecamatan Sukadana. (*sekarang sudah menjadi Kab. Kayung Utara*)
- 3. Wilayah Pembangunan III**, meliputi : a. Kecamatan tumbang Titi; b. Kecamatan Sungai Melayu; c. Kecamatan Pemahang; d. Kecamatan Jelai Hulu; e. Kecamatan Marau; f. Kecamatan Air Upas; g. Kecamatan Singkup; dan h.

Kecamatan Manis Mata. Dengan pusat pengembangan Kecamatan Tumbang Titi.

4. Wilayah Pembangunan IV, meliputi : a. Kecamatan Nanga Tayap; b. Kecamatan Sandai; c. Kecamatan Sungai Laur; d. Kecamatan Simpang Dua; e. Kecamatan Simpang Hulu; dan f. Kecamatan Hulu Sungai. Dengan pusat pengembangan Kecamatan Sandai.

Dengan demikian strategi yang ditempuh berdasarkan perwilayahan pembangunan Kabupaten Ketapang adalah terdiri atas 2 (dua) strategi, yaitu :

1. Percepatan pembangunan di wilayah pembangunan II, III, dan IV.
2. Pemantapan dan pengendalian pembangunan di wilayah pembangunan I.

Rincian strategi perwilayahan pembangunan pada setiap wilayah pembangunan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

Pada Wilayah Pembangunan I, III, dan IV, strategi yang dilakukan adalah percepatan pembangunan dalam rangka keseimbangan pembangunan antar wilayah, meliputi :

1. Peningkatan Inventasi
2. Pemberian kemudahan bagi investor
3. Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan
4. Pengendalian alih fungsi lahan
5. Optimalisasi peran serta masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

Sedangkan arah pembangunannya diutamakan untuk :

1. Pengembangan industri yang menunjang pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan serta pengembangan argo industri.
2. Pengembangan pertanian melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan distribusi pada pusat-pusat pengembangan kawasan.
4. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana atau utilitas umum ke kantong-kantong produksi, kawasan tertinggal dan daerah terisolir.
5. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan.

6. Pengendalian dan pelestarian daerah resapan air.

Pada Wilayah Pembangunan I, strategi yang dilakukan adalah dengan pemantapan dan pengendalian pembangunan, melalui :

1. Pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Pengendalian alih fungsi lahan.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

Sedangkan arah pembangunannya diutamakan untuk :

1. Pengembangan pemukiman, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata.
2. Pengembangan industri hilir dan hulu.
3. Pengembangan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana wilayah.
4. Peningkatan sarana dan prasarana atau utilitas umum untuk memperkuat dan mendukung kemajuan ekonomi daerah.
5. Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan.
6. Pengembangan pertanian melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi.
7. Pengendalian dan pelestarian daerah resapan air.

Adapun prioritas pembangunan tahun 2006 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2006 s/d 2010 yang ditujukan pada :

1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar atau utilitas umum.
2. Pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.
3. Pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan maupun upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan para medis serta upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

4. Peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
5. Pembangunan sumber daya manusia Aparatur yang ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui efisiensi dan efektifitas pengeluaran daerah.
7. Penataan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang tersebut dilaksanakan secara bersama dengan bidang-bidang pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II
ISU LINGKUNGAN
HIDUP UTAMA

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Pembangunan saran dan prasarana penunjang laju pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan sarana infrastruktur, dan sarana-sarana penunjang peningkatan pendapatan asli daerah saat ini terus dikembangkan, secara langsung atau tidak langsung akan membawa dampak baik besar ataupun kecil terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Ketapang pada khususnya semakin terus bertambah dan sangat memprihatinkan, berbagai macam cara dan metode dilakukan dalam penanggulangan maupun meminimalisasikan kerusakan lingkungan hidup baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

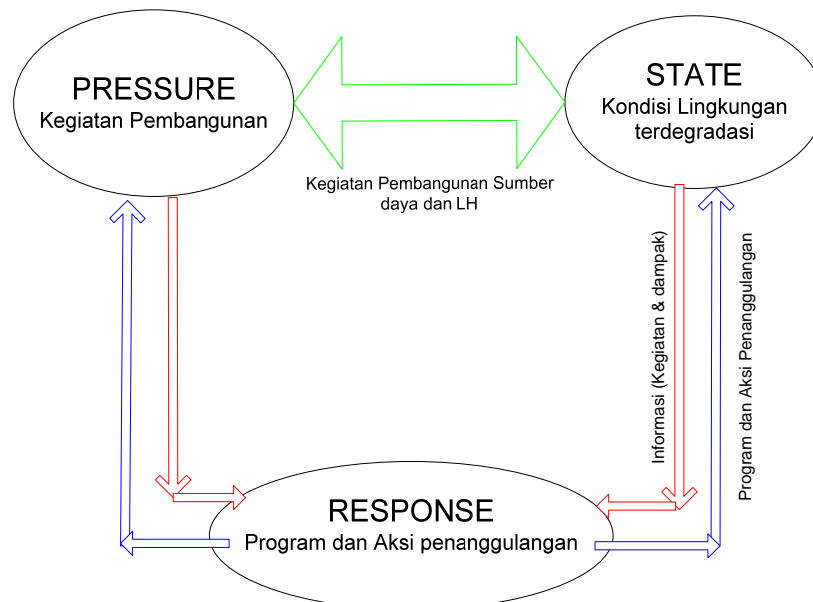
Ada beberapa isu lingkungan hidup yang dapat dicatat pada tahun 2007 ini, salah satunya secara skala nasional adalah terjadinya berbagai bencana alam di tanah air ini sehingga banyak memakan korban dan menjadi sorotan publik di tanah air maupun dari manca negara, hal itu seolah-olah disebabkan karena kesalahan diri kita sendiri yang kurang dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam skala daerah yang terjadi di Kabupaten Ketapang ini adalah masih maraknya kegiatan pembalakan liar / illegal logging, pembukaan lahan dengan dibakar dan penambangan liar. Masyarakat menganggap membuka lahan dengan dibakar yang paling mudah untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, bagi individu ataupun perusahaan, akan tetapi dampak dari akumulasi kegiatan tersebut akan sangat merugikan dari segi ekonomis, kesehatan maupun lingkungan hidup.

Kegiatan **pembalakan liar** atau illegal logging dan ladang berpindah menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih makro, karena banyak hutan yang ditebang sehingga mengalami kekeringan dan kritis karena vegetasi pembentuk kawasan tersebut ditebang tanpa adanya usaha penanaman kembali, lingkungan tidak akan mampu menampung akumulasi dari perubahan ekosistem yang sangat drastis.

Penambangan liar menyebabkan kerusakan lingkungan karena setelah selesai melakukan kegiatan mereka tidak langsung melakukan reklamasi terhadap lahan tersebut dan pencemaran air hasil pembuangan limbah yang langsung ke sungai.

Analisis isu lingkungan hidup dan evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan **S-P-R (State-Pressure-Response)**. Pendekatan ini menekankan pentingnya terlebih dahulu mengungkapkan pressure (penyebab atau tekanan) yang menekankan terjadinya perubahan komponen lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Ketapang, pressure ini ditafsirkan ke dalam kegiatan pembangunan yang selama berlangsungnya memberi beban atau merusak komponen lingkungan hidup.

Seiring dengan itu state (kondisi lingkungan abiotic-biotic- culture) yang terdegradasi dengan segala impact (dampak) yang ditimbulkan oleh keseluruhan kegiatan pembangunan yang dimaksud juga perlu diidentifikasi dan dirumuskan. Bertalian dengan itu pula response (program dan aksi penanggulangan dampak) baik yang dilakukan oleh instansi terkait secara sektoral maupun yang dilakukan oleh sejumlah instansi terkait dalam bentuk program dan aksi lintas sektoral, termasuk yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat pada umumnya, juga perlu dievaluasi dan dianalisis sampai berapa jauh response tersebut relevan dengan penanganan dampak kegiatan pembangunan, tingkat keberhasilannya, beserta hambatan-hambatan yang dialaminya. Secara sederhana pendekatan SPR ini dapat divisualisasikan melalui Gambar 2.1.



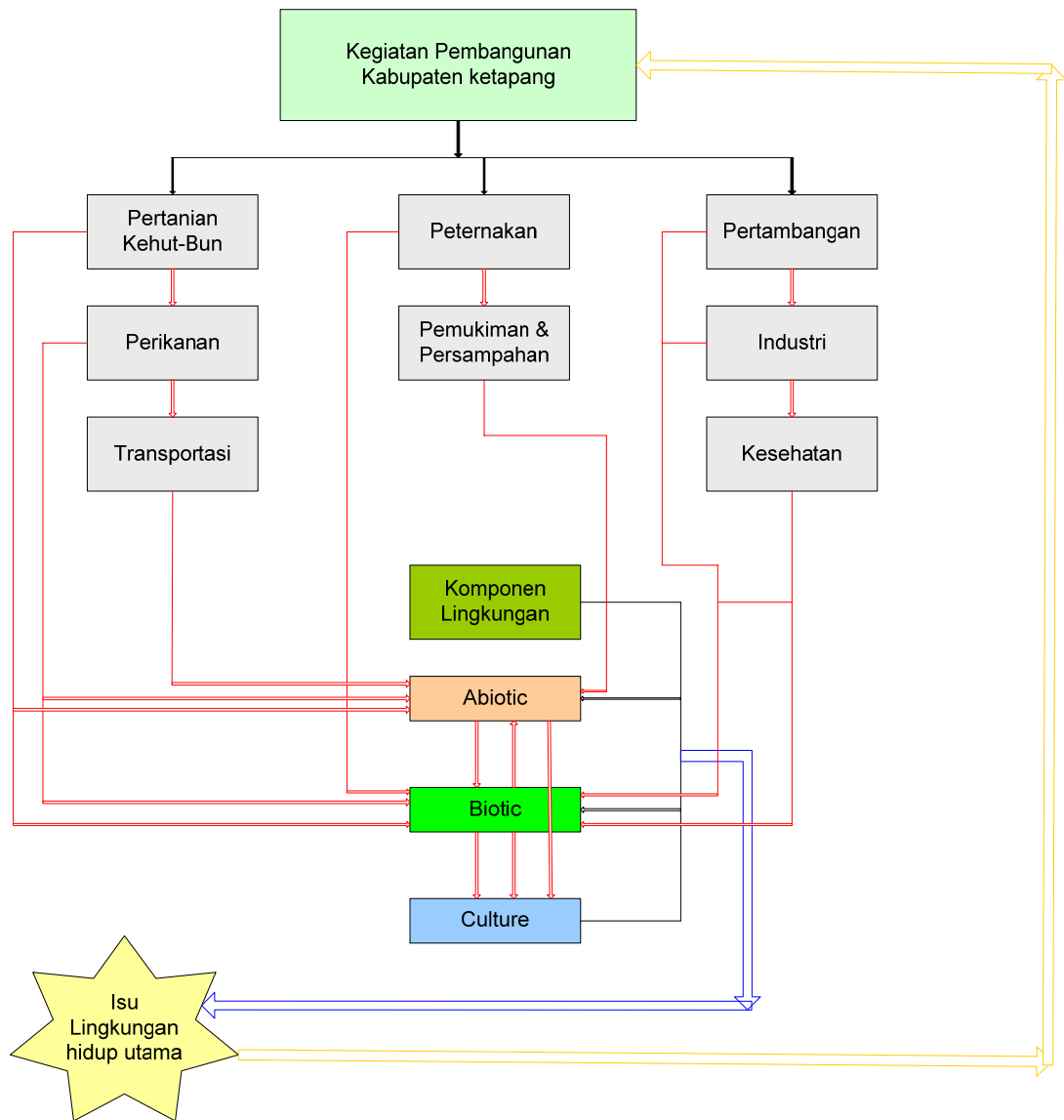
Gambar 2.1 Pendekatan SPR dalam Pengkajian Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ketapang

Terdapat 8 (delapan) kegiatan pembangunan di Kabupaten Ketapang disinyalir memberi tekanan (*pressure*) pada komponen lingkungan. Kedelapan kegiatan pembangunan yang dimaksud adalah :

1. Kegiatan pertanian
2. Kegiatan perikanan dan kelautan
3. Kegiatan kehutanan dan perkebunan
4. Kegiatan transportasi
5. Kegiatan pemukiman dan persampahan
6. Kegiatan pertambangan
7. Kegiatan industri
8. Kegiatan kesehatan masyarakat.

Kedelapan kegiatan pembangunan Kabupaten Ketapang tersebut disinyalir telah memberi tekanan pada lingkungan, baik pada komponen lingkungan abiotic, komponen lingkungan biotic, maupun komponen lingkungan culture, baik itu yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Akibat tekanan itu juga disinyalir telah memberi dampak pada setiap perubahan komponen lingkungan termaksud. Dampak-dampak itu secara geografis dapat dibedakan, yakni baik pada daerah terestrial (di darat) maupun pada daerah akuatik (di perairan).

Pada daerah terestrial disinyalir telah terjadi erosi dan sedimentasi secara besar-besaran dalam waktu yang cukup lama yang kini menjadikan pendangkalan di muara sungai. Kegiatan penebangan hutan secara liar dan penambangan liar juga disinyalir telah berlangsung lama dan kini telah merusak bentang alam dan sekaligus estetika alam, bahkan telah menimbulkan rawan erosi. Diakui bahwa selama ini pemerintah, LSM, dan Masyarakat Kabupaten Ketapang telah berbuat banyak untuk menanggulangi perusakan lingkungan, melalui program-program sektoral dari setiap instansi terkait dan LSM maupun yang dilakukan secara bersama-sama atau lintas sektoral oleh sejumlah instansi terkait dan LSM, tetapi sampai berapa jauh keberhasilan program dan aksi (*response*) mereka masih merupakan misteri yang perlu disingkapkan.



Gambar 2.2. Analisa Penyusunan berdasarkan S-P-R dan keterkaitan tekanan lingkungan dengan degradasi lingkungan

BAB III

AIR

BAB III

A I R

Gambaran secara umum pola sungai di wilayah Kabupaten Ketapang adalah dendritik dan sub dendritik, dimana Pola aliran berbentuk menyerupai cabang pohon, dimana anak-anak sungai mengalir ke satu sungai utama. Pola sungai ini biasanya berada pada daerah aliran sungai berbentuk bulu burung. Debit banjir pada daerah aliran sungai ini relatif kecil, karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai berbeda-beda namun waktu banjir berlangsung agak lama. Di Kabupaten Ketapang terbagi atas 3 (tiga) DAS besar yaitu :

1. DAS Kendawangan
2. DAS Pesaguhan
3. DAS Pawan

Ketiga DAS tersebut mempunyai memiliki beberapa anak buah sungai besar yang dapat dipergunakan masyarakat sebagai sumber air dan sarana transportasi sungai. Air sungai Kendawangan dimanfaatkan masyarakat untuk mandi, cuci, kakus, air minum, industri, perkebunan dan pertambangan serta irigasi persawahan.

Konsumsi air di Kabupaten Ketapang ini lebih banyak memanfaatkan air sungai yang diolah terlebih dahulu oleh Perusahaan Air Minum Daerah yang didistribusikan langsung ke masyarakat. Ketersediaan air bersih cenderung semakin menurun diakibatkan dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan air sungai tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan terjadinya pencemaran. Sedangkan ketersediaan air baku juga semakin lama akan mengalami penurunan akibat adanya kegiatan industri, perkebunan dan pertambangan yang banyak menggunakan air sungai sebagai sumber air bagi kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini perlu diadakan pemantauan secara intensif dan pelaporan dari kegiatan tersebut dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan ke pemerintah daerah dimana banyak penduduk kabupaten Ketapang yang berada disepanjang sungai-sungai tersebut.

A. Kuantitas dan kualitas Air

Kuantitas Air

Kabupaten Ketapang mempunyai potensi air yang cukup besar, selain didukung dengan curah hujan yang relatif tinggi, terdapat pula banyak sungai-sungai besar yang mempunyai potensi sumber air permukaan yang besar. Sehingga sepanjang tahun tidak akan terjadi kekeringan. Ketersediaan air pada sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh adanya daerah kawasan konservasi dan kondisi vegetasi yang terdapat pada daerah aliran sungainya.

Kondisi ini dinilai dari besarnya fluktuasi debit air minimum dan maksimum pada beberapa DAS yang selalu terjadi pada setiap musim kemarau, dimana air mengalami penurunan tetapi tidak sampai mengalami kekeringan, artinya air surut lebih tinggi yang menyebabkan menurunnya debit air. Tetapi apabila curah hujan yang cukup banyak maka mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Kualitas Air

Penurunan kualitas air sungai dibandingkan dengan keadaan sebelum-sebelumnya sebagai akibat dari limbah berbagai kegiatan seperti perkebunan, perindustrian domestik, illegal logging dan penambangan tanpa ijin (*PETI*) yang dapat menimbulkan dampak pencemaran. Akan tetapi secara umum penurunan kualitas air di beberapa DAS di Kabupaten ketapang ini masih dibawah batas yang ditetapkan sebagai ambang batas pencemaran, yang mana dapat diartikan air tersebut masih bisa untuk dikonsumsi oleh penduduk setempat.

Pada pemantauan kualitas air yang dilakukan di DAS Kendawangan, DAS Pesaguhan dan DAS Pawan dengan mengambil beberapa titik sampel secara random pada tahun 2006 di 6 (enam) kecamatan yang dilalui sungai tersebut.



Gambar 3.1. Kondisi DAS Kendawangan



Gambar 3.2. Kondisi DAS Pesaguhan



Gambar 3.3. Kondisi DAS Pawan

Untuk dapat mengetahui kondisi lingkungan sebagaimana yang terjadi akibat berbagai kegiatan yang berdampak terhadap perubahan lingkungan, maka perlu dilakukan suatu pengujian terutama terhadap lingkungan yang langsung mengalami perubahan akibat pencemaran tersebut. Adapun dasar dari pelaksanaan pemantauan terhadap lingkungan yang diduga mengalami pencemaran lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.

B. Permasalahan Terhadap Kualitas dan Kuantitas Air

Pengaruh tekanan terhadap kualitas dan kuantitas air disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk yang semakin besar, pengembangan usaha industri domestik, alih fungsi lahan dan kegiatan penambangan tanpa ijin (*PETI*) serta perladangan berpindah dan illegal logging yang tanpa mengindahkan fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan.

Disepanjang DAS Pesaguhan terdapat cukup marak kegiatan penambangan tanpa ijin, dimana kegiatan tersebut menambang pasir, batu, zirkon (*puya*) dan emas. Penambangan zirkon (*puya*) dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan semi mekanis dengan volume yang cukup besar dan dilakukan di beberapa tempat. Pemisahan emas dilakukan dengan mendulang dengan dicampurkan air raksa atau merkuri, bahan ini sangat berbahaya apabila sampai terhisap atau terserap ke dalam kulit. Bahan ini merupakan racun yang memiliki sifat

terakumulasi sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya sampai pada tingkat keracunan. Merkuri apabila jatuh ke tanah dan atau perairan akan terendap didasar perairan akan dirubah oleh bakteri anaerobik menjadi *methyl mercury* yang memiliki sifat sangat meracuni. Dengan perantara rantai makanan, *methyl mercury* ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan lainnya dan terakumulasi ke dalam jaringan organ tubuh terutama dalam bentuk lemak.



Gambar 3.4. Penambangan Pasir Zircon (puya) dan Emas

Disepanjang DAS Pawan dan DAS Pesaguhan marak terdapat penambangan pasir sungai, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan mesin semi mekanis dengan volume yang besar. Akibat dari penambangan pasir sungai ini adalah struktur tanah pembentuk dan penyangga tepi sungai mengalami erosi yang sangat tinggi sehingga bibir sungai banyak yang terkikis ke darat dan mengalami sedimentasi sehingga daya tampung sungai mengalami penurunan.

Kegiatan Penebangan liar (*illegal logging*) juga banyak terdapat disepanjang DAS Kendawangan, akibat dari penebangan yang tidak mematuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup ini menyebabkan areal tangkapan air mengalami penurunan yang cukup drastis, sebab penyangga utama sebagai penangkap air adalah vegetasi atau pohon-pohon yang berada di kawasan hutan dan di sepanjang sungai. Kerusakan hutan tersebut menyebabkan terjadinya sedimentasi pada sungai-sungai di beberapa DAS di Kabupaten Ketapang ini diantaranya DAS Kendawangan. Selain itu alih fungsi lahan diperuntukkan aktivitas dari kegiatan penambangan yang membuka lahan besar-besaran dan perkebunan sawit yang melakukan pembukaan lahan secara serentak dan penanaman pohon yang

homogen sehingga hilangnya penyangga-penyangga dan penahan air yang baik, hal ini disebabkan akar-akar kelapa sawit tidak dapat menggantikan fungsi vegetasi lain sebagai penangkap air yang baik sehingga menyebabkan tingkat sedimentasi dan erosi yang tinggi.

Kegiatan industri dari pengolahan hasil tambang dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tidak menutup kemungkinan baik secara sengaja atau tidak sengaja limbah yang dibuang atau dikelola pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (*IPAL*) akan menyebabkan pencemaran.

C. Respon dan Kebijakan yang diambil

Melihat kondisi kualitas sumber daya air di Kabupaten Ketapang yang cenderung mengalami penurunan walaupun masih dalam batas normal, maka pemerintah Kabupaten Ketapang perlu merespon keadaan tersebut agar tidak timbul kerusakan lingkungan yang lebih berat.

Adapun kebijakan yang perlu dilakukan dalam menanggulangi hal-hal tersebut diatas :

1. Dilakukan pemantauan kualitas air secara berkala walaupun 1 (satu) kali dalam setahun mengingat keterbatasan pendanaan dan peralatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL/UPL agar dalam pengelolaan industri harus mengacu pada Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
3. Menindak tegas pelaku illegal logging/ penebangan liar.
4. Menertibkan Penambang-penambang tanpa ijin, kemudian dilakukan pembinaan agar melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan.

BAB IV

UDARA

BAB IV U D A R A

Udara mempunyai arti penting bagi makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya, sehingga udara merupakan sumberdaya alam yang harus dilindungi untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Hal ini mempunyai arti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pengendalian pencemaran sangat penting dilakukan agar dapat menjaga kondisi kualitas udara yang diinginkan dan sesuai dengan tingkat kesehatan.

Turunnya kualitas udara dapat diartikan sebagai pencemaran udara, sehingga udara mengalami penurunan kualitas dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan kualitas dan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu berkaitan dengan sumber pencemar yang menghasilkan pencemaran udara baik itu sumber yang bergerak (kendaraan bermotor) dan sumber yang tidak bergerak (kegiatan industri). Sedangkan rangkaian pengendalian kegiatannya terkait dengan batas baku mutu udara yang diperbolehkan.



Gambar4.1. Kondisi Pemantauan Kualitas Udara

Mutu udara ambien daerah merupakan mutu udara ambien yang menggambarkan keadaan kualitas udara ambien pada suatu lokasi pada waktu

tertentu. Kondisi udara di Kabupaten Ketapang masih dalam ambang batas kondisi normal, dikarenakan keadaan jumlah kendaraan bermotor dan kegiatan industri belum begitu banyak. Kondisi terburuk hanya terjadi pada saat musim kemarau yaitu adanya kabut asap yang cukup tebal sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Ketapang. Hal itu dikarenakan kebakaran hutan yang disebabkan pembukaan lahan dengan dibakar, akan tetapi pada tahun 2007 ini kejadian kabut asap tidak terjadi kembali. Secara umum di Kabupaten Ketapang ini pencemaran udara belum terjadi dikarenakan kualitas udara masih normal dan dibawah standar baku mutu udara sehingga belum dikatakan tercemar.

Kualitas udara di wilayah Kota Kabupaten Ketapang sebagai rona lingkungan awal diperoleh berdasarkan hasil pengukuran langsung terhadap parameter kualitas udara ambient dan kebisingan di lokasi-lokasi sampling yang telah ditentukan. Penentuan lokasi sampling kualitas udara berdasarkan pada faktor meteorologi, sumber pencemar dan kegiatan disekitarnya. Sedangkan penentuan lokasi sampling kebisingan sama dengan lokasi sampling kualitas udara berdasarkan atas pertimbangan adanya sumber kebisingan, baik berupa rencana pembangunan dan operasional maupun penggal jalan tertentu yang diperkirakan sebagai sumber kebisingan, serta pemukiman penduduk yang dekat dengan sumber kebisingan. Hasil uji kualitas udara ambient dan kebisingan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1. Hasil Analisis Parameter Uji Kualitas Udara dan Kebisingan

Lokasi	Koordinat		Parameter						
			SO ₂	CO	NO ₂	HC	PM ₁₀	TSP	Noise
	BT	LS	µg/Nm ₃	µg/Nm ₃	µg/Nm ₃	µg/Nm ₃	µg/Nm ₃	µg/Nm ³	dB (A)
jl. R. Suprpto Ketapang	109° 58' 01"	1° 50' 02"	1,5	1,8	1,6	0,9	19	25	73,9
Baku Mutu*)			900	10.000	400	160	150	230	55-70

Sumber : Data UKL- UPL Ketapang City Hotel, 2007

Keterangan : *) PP RI Nomor 41. Tahun 1999 dan Kepmen Nomor Kep-48 MENLH/II/1996

Terjadinya gangguan oleh asap pada musim-musim kemarau beberapa tahun yang lalu menimbulkan dampak berkurangnya jarak pandang karena kabut asap yang cukup tebal, iritasi pada mata dan terganggunya saluran pernafasan. Hal ini sangat berpengaruh dan sangat mengganggu sekali terutama masyarakat Kabupaten Ketapang yang berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat.

Kebijakan dan Respon yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran udara adalah :

1. Melakukan monitoring kualitas udara 1 (satu) kali dalam setahun dikarenakan keterbatasan dana dan perlengkapan.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dan hutan dengan cara membakar.
3. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mengendalikan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran udara.
4. Menegaskan kepada perusahaan dan pelaku usaha agar dalam kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kualitas udara dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup.
6. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemar dan potensi emisinya.
7. Menindak tegas pelaku usaha atau masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan pencemaran udara.

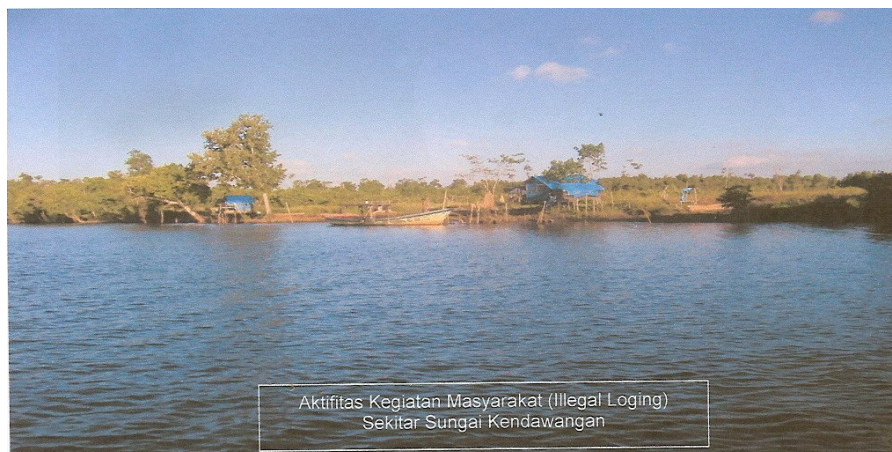
BAB V

LAHAN DAN HUTAN

BAB V LAHAN DAN HUTAN

Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pembangunan tidak sangat mudah dikarenakan pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata, disisi lain ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusi sangat terbatas, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang meningkat dan akan mengakibatkan tekanan terhadap alam itu sendiri.

Dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian dalam meningkatkan devisa bagi negara dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melakukan kebijakan arah pembangunan di berbagai sektor, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata. Untuk melaksanakan arah kebijakan dari kegiatan tersebut dilakukan dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, transmigrasi, kehutanan dan pariwisata sehingga dalam proses pelaksanaannya akan terjadi perubahan ekologi, kebakaran hutan dan lain-lain.



Gambar 5.1. Aktivitas Illegal Logging

Penurunan kondisi hutan sampai dengan tahun 2006 sangat signifikan sekali dan akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun berikutnya, secara umum hutan Indonesia mengalami penurunan kondisi $\pm 1,4 - 2$ juta Ha / tahun, kecenderungan perubahan status hutan dan lahan terus mengalami peningkatan sesuai dengan laju pembangunan yang terus dilakukan.

Penyebab terjadinya penurunan kondisi hutan dan lahan ini dikarenakan kegiatan manusia, peningkatan kesejahteraan dan laju pembangunan. Diantara beberapa kegiatan yang mengakibatkan menurunnya kondisi hutan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Ketapang pada khususnya adalah adanya penebangan liar atau illegal logging secara besar-besaran, selain itu maraknya alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan yang mengakibatkan perubahan ekologi dan ekosistem secara drastis. Pembukaan lahan dengan dibakar yang dilakukan masyarakat pada musim kemarau memang dianggap efektif, murah dan mudah akan tetapi mempunyai efek yang sangat besar bagi semua pihak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang diantaranya :

1. Kebakaran hutan dan lahan yang merupakan salah satu faktor penting penyebab kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun masih terjadi, baik itu dari faktor yang disengaja dibakar untuk membuka lahan baru atau dari faktor ketidak sengajaan dikarenakan lahan yang sangat kering.
2. Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) kebutuhan akan kayu secara perlahan terus meningkat, sementara kayu semakin sulit untuk diperoleh. Kebutuhan kayu mencapai 57,1 juta m³ per tahun sementara kemampuan hutan alam dan hutan tanaman industri hanya mampu menyediakan 45,8 juta m³ per tahun, dengan demikian terjadi defisit dalam pemenuhan kebutuhan sebesar 11,3 juta m³ per tahun. Sehingga pemenuhan kekurangan kebutuhan kayu tersebut berasal dari kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).
3. Pengubahan fungsi status kawasan hutan (*konversi hutan*) untuk keperluan lain menyebabkan kerusakan lahan dan hutan, khususnya pengkonversian hutan menjadi kawasan perkebunan, pertambangan, pertanian, pemukiman dan transmigrasi. Dalam kegiatan konversi hutan dan lahan tersebut mengubah fungsi hutan dengan cara membuka kawasan hutan secara besar-besaran dan menggantikan vegetasi yang ada dengan varietas baru yang cenderung homogen.

Akibat yang dirasakan langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat adalah terjadinya erosi yang lebih tinggi yang berakibat tanah kehilangan sifat plastisnya sehingga terjadi banjir, penurunan porositas dan infiltrasi tanah serta berkurangnya daya tangkap tanah terhadap air. Dengan terjadinya hal tersebut maka akan berkurang juga flora dan fauna yang ada di hutan sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu.

Kebijakan yang dilakukan dalam mengurangi kerusakan lahan dan hutan adalah dengan bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak perusahaan melakukan pengawasan secara intensif aktivitas pembukaan lahan dengan mengeluarkan aturan mengenai pembukaan lahan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi hutan dan lahan serta mendorong masyarakat dan pihak perusahaan berpartisipasi secara aktif dalam pengendalian kelestarian hutan.

BAB VI
KEANEKARAGAMAN
HAYATI

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati adalah adanya beraneka ragam ekosistem, jenis dan variabilitas genetika binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup. Keanekaragaman hayati merupakan bagian yang secara ekologis mempunyai peran penentu keseimbangan ekosistem bagi kehidupan, terutama penyediaan kebutuhan keanekaragaman bahan-bahan hayati dan merupakan penopang utama dalam kelangsungan hidup manusia.

Ekosistem merupakan kumpulan dari banyak spesies yang berinteraksi satu sama lainnya dengan lingkungan fisik. Atas dasar pelestarian keanekaragaman hayati tersebut menjadi sangat penting demi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara benar. Ancaman yang dihadapi dalam pelestarian keanekaragaman hayati diantaranya adalah pengaruh perubahan iklim, eksploitasi yang berlebihan atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran, kehadiran spesies lain yang invasif, kegiatan pembudidayaan yang tidak disertai dengan upaya yang menjamin kelestarian berbagai spesies yang dibudidayakan.

Untuk mendukung tercapainya rencana pembangunan di Kabupaten Ketapang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan kepada para pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait lainnya lebih meningkatkan upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana, pengembangan nilai manfaat, lestari, dan konservatif.

BAB VII

PESISIR DAN LAUT

BAB VII PESISIR DAN LAUT

Kabupaten Ketapang mempunyai panjang pantai ±364 Km yang berhadapan dengan laut jawa dan laut natuna. Gambaran secara umum kondisi kawasan pesisir dan laut Kabupaten Ketapang ini belum terindikasi oleh pencemaran, dikarenakan belum adanya industri atau kegiatan usaha lain yang berada di kawasan pesisir dan laut.

Potensi kerusakan yang terjadi di pesisir Kabupaten Ketapang diantaranya kerusakan ekosistem bakau (*mangrove*) akibat adanya abrasi laut dan pembuatan jalan di sepanjang pesisir pantai. Selain itu kerusakan ekosistem delta disebabkan adanya aliran sedimendengan kecepatan rendah sehingga terjadi penumpukan di muara sungai.

Pencemaran laut bisa menyebabkan kerusakan komponen hayati perairan dan juga dapat membahayakan kesehatan manusia. Ada beberapa hal yang menyebabkan pencemaran laut diantaranya disebabkan daerah hulu yang sudah gundul sehingga terjadi penumpukan sedimentasi dan masuk ke laut melalui muara-muara sungai. Selain itu digunakannya sungai sebagai salah satu alternatif sarana transportasi mendistribusikan hasil-hasil kayunya dan kegiatan penambangan liar (*illegal minning*) dengan menggunakan mercury sebagai bahan pemisah emas ayang limbahnya dibuang kesungai akan terbawa sampai ke laut dan akan menyebabkan polusi ekosistem laut. Pembuangan limbah kegiatan manusia di daratan dan pesisir yang tidak menghiraukan kelestarian lingkungan juga akan menyebabkan air laut mudah tercemar. Kegiatan pelabuhan, keluar masuk kapal nelayan yang menuju laut juga berpotensi menimbulkan polusi terutama yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal-kapal tersebut.

Kebijakan yang ditempuh guna menanggulangi kerusakan kawasan pesisir dan laut di Kabupaten Ketapang adalah :

1. Pengawasan terhadap keluar masuknya kapal dan kegiatan bongkar muat barang sehingga dapat meminimalisasi tumpahan-tumpahan minyak ke pelabuhan atau laut.
2. Merehabilitasi kawasan hutan *mangrove* guna menanggulangi kerusakan akibat menurunnya kualitas fisik dan habitat *mangrove*.

-
-
3. Pemantauan kawasan hulu sungai dari kegiatan perusakan lahan sehingga tidak terjadi erosi yang berakibat menumpuknya bahan-bahan sedimentasi di muara sungai.

BAB VIII

REKOMENDASI

BAB VIII REKOMENDASI

Berdasarkan analisa dan evaluasi kebijakan dari berbagai respon yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tentang berbagai permasalahan lingkungan, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai sektor baik pusat, propinsi maupun kabupaten / kota.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta meningkatkan anggaran untuk lingkungan hidup agar secara nyata dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Melibatkan peran serta masyarakat dan pihak-pihak perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Pemantauan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai potensi sumberdaya air dengan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara intensif dengan daya dukung peralatan dan anggaran yang mencukupi.
6. Berkerja sama dengan semua unsur masyarakat dan LSM serta pihak perusahaan dalam pemulihan kerusakan hutan dan lahan.
7. Meningkatkan kebijakan pengelolaan pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar pesisir dan laut.
8. Program penataan kelembagaan penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan seperti penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya alam dan penguatan institusi dan aparatur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

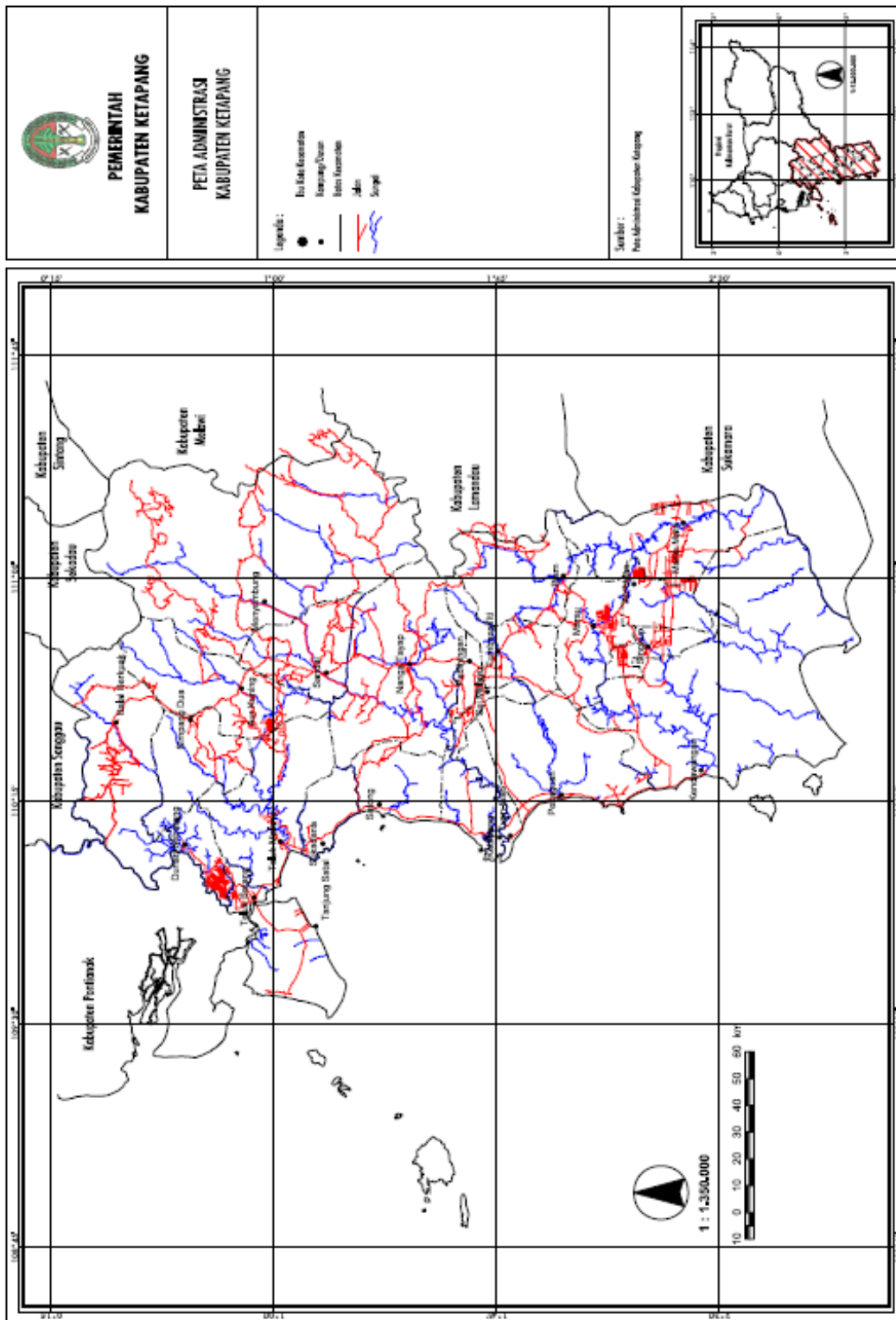
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

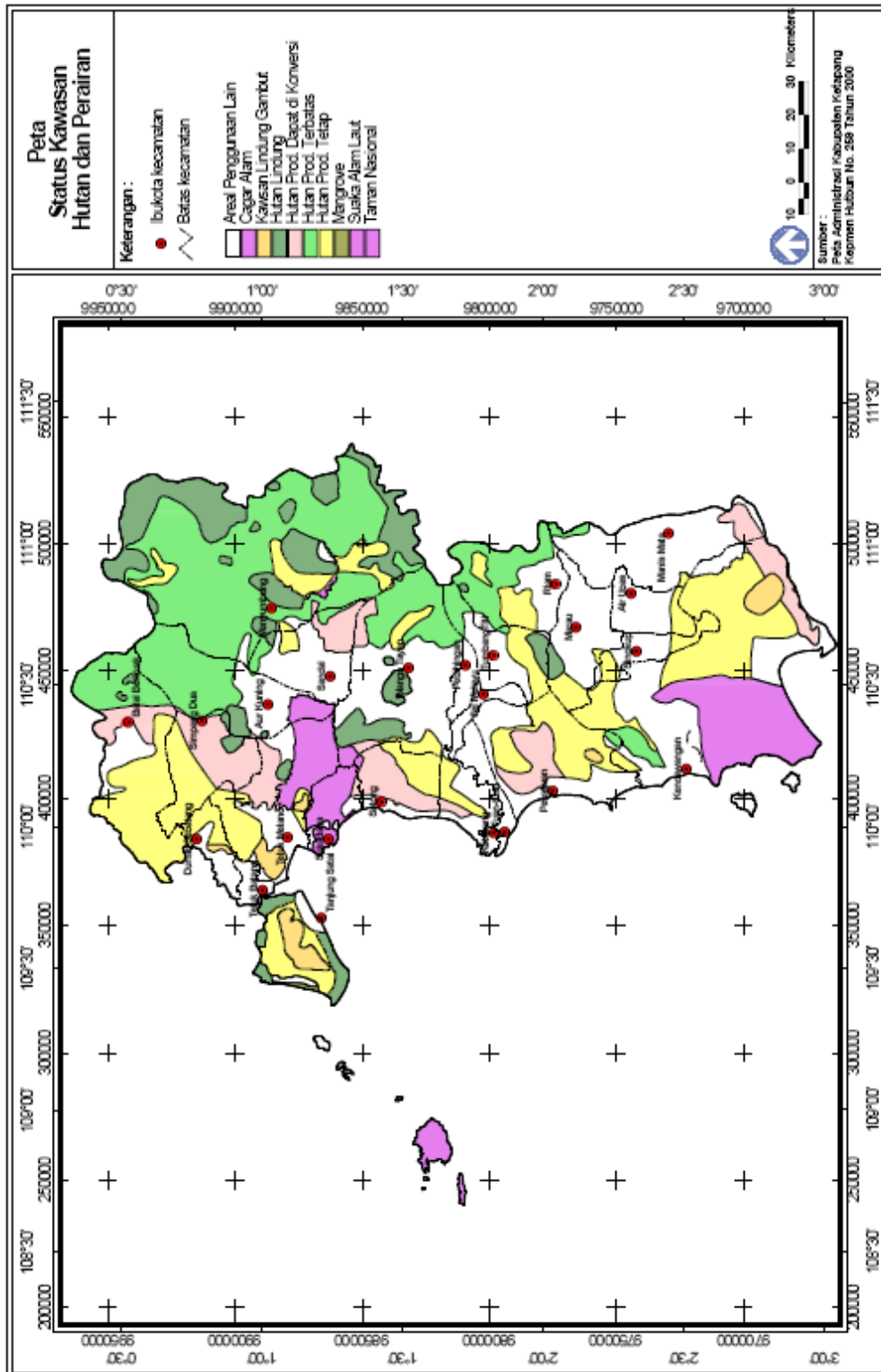
- Anonim. 1993. Pedoman Penyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi lahan dan konservasi Tanah sub Daerah Aliran sungai. Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. Jakarta.
- BPS. 2007. Kabupaten Ketapang Dalam Angka. Ketapang
- Anonim, 1998. Dasar-dasar Demografi. UI Press. Jakarta.
- Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Boer, C. 1994. Studi tentang keanekaragaman jenis burung berdasarkan tingkat pemanfaatan hutan hujan tropis di Kalimantan Timur. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman-GTZ. Terjemahan
- FAO, ISRIC and ISSS. 1994. World Reference Base for Soil Resources. Rome.
- Odum, P. E. 1993. Dasar-Dasar Ekologi Edisi Ke Tiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 1993. Petunjuk Tekhnis Evaluasi Lahan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat bekerjasama dengan Proyek Pembangunan Penelitian Pertanian Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Deptan.
- RePPPProt. 1987. Review of Phase I Result East and South Kalimantan Vol. 1, 2. Ditjen. PANKIM, Dept. Trans., Jakarta.
- Richards, P. W. 1996. The Tropical Rain Forest An Ecological Study. Cambridge.
- Schmidt, F.H. and J.H. Ferguson. 1951. Rainfall Types Based on Wet and Dry Period Ratios for Indonesia with West New Guinea. Verh. 42. Jawatan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta.
- Singarimbun, M., 1997. Penduduk dan Kemiskinan. Binarata Karya Aksara
- Soil Survey Staff. 1995. Keys to Soil Taxonomy. Agency for International Development, USDA, Soil Management Support Services.
- Soerianegara, I. dan Indrawan, A. 1976. Ekologi Hutan Indonesia. Lembaga Kerjasama Institut Pertanian Bogor. Bogor.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Peta Administrasi Kabupaten Ketapang



Lampiran 2. Status Kawasan Hutan dan Perairan Kab. Ketapang



Lampiran 3. Sumber Air PDAM Kab. Ketapang di Sungai Pawan



Lampiran 4. Salah satu kegiatan masyarakat di Sungai Pawan



Lampiran 5. Kegiatan pengambilan sampel



Lampiran 6. Masyarakat menggunakan sungai sebagai sarana MCK
